

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Ruang Lingkup Akuntansi

2.1.1.1 Pengertian Akuntansi

Menurut Kieso, Weygant, dan Warfield (2016:2) pengertian akuntansi adalah sebagai berikut:

“Accounting consist of three basic activities – it identifies, records, and communicates the economic events of an organization to interest users. A company identifies the economic events relevant to its business and then records those events in order to provide a history of financial activities. Recordings consist of keeping a systematic, chronological diary of events, measured in dollar and cents. Finally, communicates the collected information to interest user by means accounting reports are called financial statement.”

Menurut Mulyadi (2010:3) akuntansi sebagai berikut:

“Akuntansi adalah organisasi formulir, mencatat, dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk memberikan informasi keuangan yang diperlukan oleh pihak manajemen untuk memudahkan pengolahan perusahaan.”

Menurut Hanafi dan Abdul Halim (2014:27) akuntansi sebagai berikut:

“Proses Pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pengkomunikasian informasi ekonomi yang bisa dipakai untuk penilaian (*judgement*) dan pengambilan keputusan oleh pemakai informasi tersebut.”

Menurut Dwi Martani (2012:4), pengertian akuntansi adalah sebagai berikut:

“Akuntansi menghasilkan informasi yang menjelaskan kinerja keuangan entitas dalam suatu periode tertentu dan kondisi keuangan entitas pada tanggal tertentu.”

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, dan pengkomunikasian hasil akhir berupa laporan keuangan yang menjelaskan kinerja dan kondisi keuangan perusahaan kepada pihak–pihak yang berkepentingan.

2.1.1.2 Bidang-bidang Akuntansi

Menurut Rahman Pura (2013:4) bidang-bidang akuntansi ada sepuluh macam, yaitu :

1. “Akuntansi Keuangan
Adalah bidang akuntansi dari suatu entitas ekonomi secara keseluruhan. Akuntansi ini menghasilkan laporan keuangan yang ditujukan untuk semua pihak khususnya pihak-pihak dari luar perusahaan, sehingga laporan yang dihasilkannya bersifat serbaguna (*general purpose*).
2. Akuntansi Manajemen
Adalah akuntansi yang khusus memberi informasi bagi pimpinan perusahaan/manajemen untuk pengambilan keputusan dalam rangka pencapaian tujuan perusahaan.
3. Akuntansi Biaya
Adalah akuntansi yang kegiatan utamanya adalah menetapkan, mencatat, menghitung, menganalisis, mengawasi, serta melaporkan kepada manajemen tentang biaya dan harga pokok produksi.
4. Akuntansi Pemeriksaan
Bidang ini berhubungan dengan pemeriksaan secara bebas terhadap laporan akuntansi yang dibuat bisa lebih percaya secara obyektif.
5. Sistem Akuntansi
Bidang ini melakukan perencanaan dan implementasi dari prosedur pencatatan dan pelaporan data akuntansi.
6. Akuntansi Perpajakan
Adalah bidang akuntansi yang bertujuan untuk membuat laporan keuangan untuk kepentingan perpajakan dan perencanaan perpajakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

7. Akuntansi Pemerintahan
Adalah bidang akuntansi yang bertujuan untuk menyajikan suatu laporan keuangan, pengendalian, serta memberikan pengawasan keuangan pemerintah atau keuangan negara.
8. Akuntansi Anggaran
Bidang ini berhubungan dengan penyusunan rencana keuangan perusahaan mengenai kegiatan perusahaan untuk jangka waktu tertentu dimasa mendatang serta Analisa dan pengawasannya.
9. Akuntansi Organisasi Nirlaba
Adalah bidang akuntansi yang proses kegiatannya dilakukan oleh organisasi non laba seperti Lembaga swadaya masyarakat (LSM), Yayasan, dll
10. Akuntansi Pendidikan
Salah satu bidang akuntansi yang secara khusus diarahkan di bidang pendidikan, misalnya mengajar akuntansi, penelitian tentang akuntansi, atau yang lainnya selama masih berhubungan dengan ilmu akuntansi.”

2.1.1.3 Laporan Keuangan

Pada setiap akhir usaha, setiap perusahaan atau lembaga menyusun laporan keuangan yang selanjutnya dilaporkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Berikut ini beberapa pengertian laporan keuangan dari beberapa sumber:

Menurut Kasmir (2014:7), definisi laporan keuangan sebagai berikut:

“Laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu.”

Menurut Munawir (2002:56), laporan keuangan sebagai berikut:

“Laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasilhasil operasi yang telah dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan.”

Menurut Bambang Riyanto (2012:327), definisi laporan keuangan sebagai berikut:

“Laporan *Finansiil (Financial Statement)*, memberikan ikhtisar mengenai keadaan *finansiil* suatu perusahaan, dimana Neraca (*Balance Sheets*) mencerminkan nilai aktiva, utang dan modal sendiri pada suatu saat tertentu, dan laporan Rugi dan Laba (*Income Statement*) mencerminkan hasil-hasil yang dicapai selama periode tertentu, biasanya meliputi periode satu tahun.”

Jadi, dapat diketahui bahwa laporan keuangan adalah laporan yang dapat menggambarkan kondisi keuangan perusahaan selama periode tertentu yang dapat berguna pihak-pihak yang membutuhkan laporan keuangan tersebut.

2.1.1.4 Tujuan Laporan Keuangan

Menurut Irham Fahmi (2015:24) tujuan laporan keuangan adalah sebagai berikut:

“Untuk memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan tentang kondisi suatu perusahaan dari sudut angka-angka dalam satuan moneter.”

Sedangkan Menurut Kasmir (2013:11) tujuan laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. “Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
2. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
3. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu.
4. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu.
5. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva, dan modal perusahaan.
6. Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan lain dan informasi keuangan lainnya.”

2.1.1.5 Jenis-jenis Laporan Keuangan

Menurut Satriawan, Raja Adi (2012:30) jenis-jenis laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. “Laporan laba rugi (*statement of income*) dan/atau laporan laba rugi komprehensif (*statement of comprehensive income*) selama periode.
2. Laporan perusahaan ekuitas (*statement of financial position*) pada akhir periode.
3. Laporan posisi keuangan (*statement of financial position*) pada akhir periode.
4. Laporan arus kas (*statement of cash flow*) selama periode.
5. Catatan atas laporan keuangan (*notes of financial statement*), yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi penting dan informasi penjelasan lainnya.
6. Laporan posisi keuangan awal periode komparatif terawal, yang disajikan apabila entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya.”

Menurut Kasmir (2014:9), secara umum ada lima jenis laporan keuangan yang biasa disusun, yaitu:

1. “*Balance Sheet* (Neraca)
Balance Sheet (neraca) merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu. Arti dari posisi keuangan dimaksudkan adalah posisi jumlah dan jenis aktiva (harta) dan passiva (kewajiban dan ekuitas) suatu perusahaan.
2. *Income Statement* (Laporan Laba Rugi)
Income Statement (Laporan laba rugi) merupakan laporan keuangan yang menggambarkan hasil usaha perusahaan dalam satu periode tertentu. Dalam laporan laba rugi ini tergambar jumlah pendapatan dan sumber pendapatan yang diperoleh. Kemudian juga tergambar jumlah biaya dan jenis jenis yang dikeluarkan selama periode tertentu.
3. Laporan Perubahan Modal
Laporan Perubahan Modal merupakan laporan yang berisi jumlah dan jenis modal yang dimiliki pada saat ini. Kemudian, laporan ini juga menjelaskan perubahan modal dan sebab-sebab terjadinya perubahan modal di perusahaan.
4. Laporan Arus Kas
Laporan arus kas merupakan laporan yang menunjukkan arus kas masuk dan

kas keluar perusahaan. Arus kas masuk merupakan pendaatan atau pinjaman dari pihak lain, sedangkan arus kas keluar merupakan biaya-biaya yang telah dikeluarkan perusahaan. Baik arus kas masuk maupun arus kas keluar dibuat untuk periode tertentu.

5. Laporan Catatan Atas Laporan Keuangan

Laporan catatan atas laporan keuangan merupakan laporan yang dibuat berkaitan dengan laporan keuangan yang disajikan. Laporan ini memberikan informasi tentang penjelasan yang dianggap perlu atas laporan keuangan yang ada sehingga menjadi jelas sebab penyebabnya. Tujuannya adalah agar pengguna laporan keuangan dapat memahami jelas data yang disajikan.”

2.1.1.6 Pengertian Akuntansi Perpajakan

Menurut Agoes dan Estralita (2013:10) Akuntansi perpajakan sebagai berikut:

“Akuntansi pajak adalah menetapkan besarnya pajak terutang berdasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan.”

Menurut Setiawan, Agus (2006:8) Akuntansi Perpajakan sebagai berikut:

“Akuntansi pajak adalah sekumpulan prinsip, standar, perlakuan akuntansi pajak digunakan untuk mempermudah surat pemberitahuan pajak (SPT) masa dan tahun pajak penghasilan dimana wajib pajak tersebut terdaftar. SPT tahunan pajak penghasilan harus diisi sesuai dengan laporan keuangan fiskal dan harus dilampirkan antara akuntansi komersial dengan akuntansi pajak terdapat perbedaan kebijakan dalam hal pengukuran pendapatan biaya.”

Menurut Sukrisno Agoes, Estralita Trisnawati (2010:7-8) Akuntansi perpajakan sebagai berikut:

“Akuntansi yang diterapkan sesuai dengan peraturan perpajakan disebut akuntansi pajak. Akuntansi pajak merupakan bagian dari akuntansi komersial yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Akuntansi pajak hanya digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan perpajakan. Dengan adanya akuntansi pajak WP dapat dengan lebih mudah menyusun SPT. Sedangkan akuntansi komersial disusun dan disajikan berdasarkan SAK. Namun, untuk kepentingan

perpajakan, akuntansi komersial harus disesuaikan dengan aturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.”

2.1.1.7 Konsep Dasar Akuntansi Perpajakan

Konsep dasar Akuntansi Perpajakan menurut Sukrisno Agoes (2014:11)

sebagai berikut:

1. “Pengukuran dalam mata uang, satuan mata uang adalah pengukur yang sangat penting dalam dunia usaha.
2. Kesatuan Akuntansi, suatu usaha dinyatakan terpisah dari pemiliknya apabila transaksi yang terjadi dengan pemiliknya.
3. Konsep Kesenambungan, dalam konsep diatur bahwa tujuan pendirian suatu perusahaan adalah untuk berkembang dan mempunyai kelangsungan hidup seterusnya.
4. Konsep Nilai Historis, transaksi bisnis dicatat berdasarkan harga pada saat terjadinya transaksi tersebut.
5. Periode Akuntansi, periode akuntansi tersebut sesuai dengan konsep kesenambungan dimana hal ini mengacu pada Pasal 28 Ayat 6 UU KUP Nomor 16 Tahun 2009.
6. Konsep Taat Asas, dalam konsep ini penggunaan metode akuntansi dari satu periode ke periode berikutnya haruslah sama.
7. Konsep Materialitas, konsep ini diatur dalam Pasal 9 Ayat 2 UU PPh Nomor 36 Tahun 2008.
8. Konsep Konservatisme, dalam konsep ini penghasilan hanya diakui melalui transaksi, tetapi sebaliknya kerugian dapat dicatat walaupun belum terjadi.
9. Konsep Realisasi, menurut konsep ini penghasilan hanya dilaporkan apabila telah terjadi transaksi penjualan.
10. Konsep Mempertemukan Biaya dan Penghasilan, laba neto diukur dengan perbedaan antara penghasilan dan beban pada periode yang sama.”

2.1.2 Profitabilitas

2.1.2.1 Pengertian Profitabilitas

Pada umumnya setiap perusahaan memiliki tujuan utama untuk memperoleh laba atau keuntungan. Manajemen perusahaan sering kali dituntut untuk mampu mencapai target yang telah direncanakan untuk mencapai tingkat profitabilitas yang baik.

Menurut R. Agus Sartono (2012:122) profitabilitas adalah sebagai berikut:

“Profitabilitas merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Dengan demikian bagi investor jangka panjang akan sangat berkepentingan dengan analisis profitabilitas ini.”

Menurut Irham Fahmi (2015:135) definisi profitabilitas adalah sebagai berikut:

“Rasio Profitabilitas mengukur efektivitas secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan maupun investasi.”

Sedangkan Menurut Kasmir (2015:196) definisi rasio profitabilitas adalah sebagai berikut:

“Profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Pada dasarnya penggunaan rasio ini menunjukkan tingkat efisiensi perusahaan.”

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat diketahui bahwa rasio profitabilitas adalah rasio untuk mengukur seberapa besar sebuah perusahaan mampu menghasilkan laba dengan menggunakan semua faktor perusahaan yang adadidalamnya untuk menghasilkan laba yang maksimal. Rasio profitabilitas ini yang biasanya dijadikan bahan pertimbangan seorang investor dalam menanamkan sahamnya disuatu perusahaan. Bila suatu perusahaan memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi terhadap pengembalian saham, maka seorang investor akan memilih perusahaan tersebut untuk menanamkan sahamnya.

2.1.2.2 Tujuan dan Manfaat Rasio Profitabilitas

Rasio profitabilitas memiliki tujuan dan manfaat untuk tidak hanya bagi pihak pemilik usaha atau manajemen saja, tetapi juga bagi pihak di luar perusahaan, terutama pihak-pihak yang memiliki hubungan atau kepentingan dengan perusahaan.

Tujuan dari penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan, maupun bagi pihak luar perusahaan menurut Kasmir (2015:197) adalah :

1. “Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu.
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
5. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.
6. Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri.”

Sementara itu manfaat yang diperoleh dari profitabilitas menurut Kasmir (2015:198) adalah sebagai berikut:

1. “Untuk mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode.
2. Untuk mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Untuk mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Untuk mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan laba sendiri.
5. Untuk mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.”

Penggunaan rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara berbagai komponen yang ada di laporan keuangan, terutama laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi. Pengukuran dapat dilakukan untuk

beberapa periode operasi. Tujuannya adalah agar terlihat perkembangan perusahaan dalam rentang waktu tertentu, baik penurunan atau kenaikan.

2.1.2.3 Metode Pengukuran Rasio Profitabilitas

Menurut R. Agus Sartono (2012:113) terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur profitabilitas, yaitu:

1. “*Gross Profit Margin*”

Gross profit margin menggambarkan laba kotor yang dapat dicapai dari jumlah penjualan. Rumus perhitungan GPM adalah sebagai berikut:

$$\text{Gross Profit Margin} = \frac{\text{Laba Kotor}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$$

2. *Operating Profit Margin*

Operating Profit Margin menggambarkan “*Pure Profit*” yang diterima atas setiap rupiah dari penjualan yang dilakukan. Semakin tinggi rasio *operating profit margin*, maka semakin baik pula operasi suatu perusahaan. *Operating profit margin* dihitung menggunakan rumus:

$$\text{operating Profit Margin} = \frac{\text{Laba operasi}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$$

3. *Net Profit Margin*

Net Profit Margin adalah ukuran profitabilitas perusahaan dari penjualan setelah memperhitungkan semua biaya dan pajak penghasilan. Rasio ini berfungsi untuk mengukur tingkat kembalian keuntungan bersih terhadap penjualan bersihnya. Hal ini mengindikasikan seberapa baik perusahaan dalam menggunakan biaya operasional karena menghubungkan laba bersih dengan penjualan bersih. *Net profit margin* sering digunakan untuk mengevaluasi efisiensi perusahaan dalam mengendalikan beban-beban yang berkaitan dengan penjualan. Semakin tinggi *net profit margin*, maka semakin baik operasi perusahaan. *Net profit margin* dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{net Profit Margin} = \frac{\text{Laba setelah pajak}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$$

4. *Return On Asset*

Return On Assets (ROA) merupakan pengukuran kemampuan perusahaan secara keseluruhan dalam menghasilkan keuntungan dengan jumlah keseluruhan aktiva yang tersedia di dalam perusahaan. *ROA* dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{return on asset} = \frac{\text{Laba bersih setelah pajak}}{\text{total aktiva}} \times 100\%$$

5. *Return On Equity*

Return On Equity adalah rasio yang menunjukkan berapa persen diperoleh laba bersih bila diukur dari modal pemilik. Rasio ini merupakan ukuran profitabilitas dari sudut pandang pemegang saham dan merupakan alat yang paling sering digunakan investor dalam pengambilan keputusan investasi. *Return On Equity* dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{return on equity} = \frac{\text{Laba Kotor}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$$

2.1.2.4 *Return On Asset*

Menurut Irham Fahmi (2015:84) *Return On Assets* adalah sebagai berikut:

“ROA ini melihat sejauh mana investasi yang telah ditanamkan mampu memberikan pengembalian keuntungan sesuai dengan yang diharapkan.”

Sedangkan Menurut Lukman Syamsuddin (2011: 63) *Return On Assets* sebagai berikut:

“Rasio ini merupakan pengukuran kemampuan perusahaan secara keseluruhan dalam menghasilkan keuntungan dengan jumlah keseluruhan aktiva yang tersedia di dalam perusahaan. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik keadaan suatu perusahaan.”

Menurut Kieso, Weygant, dan Warfield (2014:518) *Return On Assets* sebagai berikut:

“Ratio between net profit after tax and interest to the amount of sales of the

company.”

Dari definisi di atas dapat diketahui bahwa *Return On Assets* merupakan rasio yang melihat sejauh mana investasi yang telah ditanamkan mampu memberikan pengembalian keuntungan bagi perusahaan.

2.1.3 Leverage

2.1.3.1 Pengertian Leverage

Setiap perusahaan memerlukan sumber dana untuk menjalankan operasinya, sumber dana yang dibutuhkan biasanya terdapat dari modal sendiri atau dari pinjaman. Menggunakan modal dari pinjaman harus membayar bunga secara rutin yang merupakan beban tetap perusahaan, *leverage* timbul karena perusahaan menggunakan aktiva tetap yang diperoleh melalui hutang yang harus membayar biaya bunga atau beban tetap perusahaan dengan nilai sesuai persetujuan yang telah ditetapkan. Ada beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli mengenai pengertian *leverage* antara lain:

Menurut J.Fred Weston dan Thomas E. Copeland (2011:238) *leverage* adalah:

“Ratio that measures the extent to which the company's have been financed by the use of debt.”

Menurut Mamduh M Hanafi dan Abdul Halim (2012:78) *leverage* adalah:

“Leverage adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya, leverage dapat dihitung dengan rasio total hutang terhadap total ekuitas. Rasio ini menghitung seberapa jauh dana yang disediakan oleh kreditur.”

Menurut Keiso, Weygant, dan Warfield (2014:213) rasio

leverage adalah sebagai berikut:

“*Ratio leverage is ratio that measures of degree of protection for longterm creditors and investors.*”

Kasmir (2013:151) menyatakan *leverage* ratio adalah sebagai berikut:

“*Leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivasnya. Dalam arti luas dikatakan bahwa rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan (dilikuidasi)”.

Berdasarkan definisi di atas dapat dijelaskan bahwa *leverage* digunakan untuk mengukur seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang sehingga munculnya biaya bunga. Biaya bunga merupakan beban tetap yang menjadi kewajiban ditanggung oleh perusahaan, Penggunaan rasio *leverage* diukur dengan perbandingan antara total aktiva dengan total utang, ukuran tersebut mensyaratkan agar perusahaan mampu memenuhi semua kewajibannya, baik kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjang.

2.1.3.2 Tujuan dan Manfaat *Leverage*

Penghitungan *leverage* memberikan banyak manfaat untuk berbagai pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan. Berikut ini adalah beberapa tujuan dan manfaat dengan menggunakan rasio *leverage*.

Menurut Kasmir (2013:153) terdapat beberapa tujuan perusahaan menggunakan rasio *leverage*, yaitu:

1. “Untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya (kreditor).
2. Untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap.
3. Untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal.
4. Untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan yang dibiayai oleh hutang.
5. Untuk menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva.”

Sementara itu, manfaat rasio *leverage* menurut Kasmir (2013:154) adalah sebagai berikut:

1. “Untuk menganalisis kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya.
2. Untuk menganalisis kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasukbunga).
3. Untuk menganalisis keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal.
4. Untuk menganalisis seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang.
5. Untuk menganalisis seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva.”

2.1.3.3 Metode Pengukuran Rasio Leverage

Menurut J.Fred Weston dan Thomas E. Copeland (2011:242) terdapat beberapa jenis rasio *leverage* yang biasa dimanfaatkan oleh perusahaan, diantaranya sebagai berikut:

1. “*Debt Total Assets Ratio*
Debt to Asset Ratio merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Dengan kata lain, seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Semakin tinggi persentase *Debt to Assets Ratio*, semakin besar risiko keuangannya bagi kreditor maupun pemegang saham. Jika rasio ini tinggi maka pendanaan dengan utang semakin banyak, sehingga semakin sulit

bagi perusahaan untuk memperoleh tambahan pinjaman, dikhawatirkan perusahaan tidak mampu menutupi utang-utangnya dengan aktiva yang dimilikinya.

$$\text{Debt to Assets Ratio} = \frac{\text{Total Liabilities}}{\text{Total Assets}} \times 100\%$$

Keterangan : Total Liabilities = Total Hutang

2. *Debt to Equity Ratio*

Rasio ini merupakan rasio yang mengukur tingkat hutang terhadap modal yang dimiliki perusahaan. *Debt to equity ratio* dapat mencerminkan kemampuan perusahaan untuk membayar hutangnya dengan modal (modal yang dimilikinya). Rasio ini juga mampu menilai kemampuan perusahaan untuk menggunakan modal yang berasal dari pinjaman dalam menunjang kegiatan perusahaan terutama untuk meningkatkan laba perusahaan. Semakin tinggi *debt to equity ratio* suatu perusahaan maka semakin tinggi hutang yang dimiliki perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan lebih memilih untuk menutupi hutangnya dibanding membagikan dividen.

$$\text{Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Total Liabilities}}{\text{Total Equity}} \times 100\%$$

Keterangan : Total Equity = Total Ekuitas (Modal)

3. *Times Interest Earned Ratio*

Rasio ini merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan untuk membayar biaya bunga. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin besar kemungkinan perusahaan dapat bunga pinjaman dan dapat menjadi ukuran untuk memperoleh tambahan pinjaman baru dari kreditor.

$$\text{Time Interest Earned Ratio} = \frac{\text{Income Before Interest Expenses}}{\text{Tax Interest Expenses}} \times 100\%$$

Debt to Equity Ratio (DER) merupakan rasio yang mengukur tingkat hutang terhadap modal yang dimiliki perusahaan. *Debt to equity ratio* dapat mencerminkan kemampuan perusahaan untuk membayar hutangnya dengan modal (modal yang dimilikinya). Rasio ini juga mampu menilai kemampuan perusahaan

untuk menggunakan modal yang berasal dari pinjaman dalam menunjang kegiatan perusahaan terutama untuk meningkatkan laba perusahaan. Semakin tinggi *debt to equity ratio* suatu perusahaan maka semakin tinggi hutang yang dimiliki perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan lebih memilih untuk menutupi hutangnya dibanding membagikan dividen.

2.1.3.4 *Debt to Equity Ratio*

Menurut Kasmir (2014:157) *debt to equity ratio* sebagai berikut:

“*Debt to equity ratio* merupakan rasio yang digunakan untuk menilai hutang dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh hutang, termasuk hutang lancar dengan seluruh ekuitas. Rasio ini digunakan untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam (kreditor) dengan pemilik perusahaan. Dengan kata lain, rasio ini berfungsi untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan untuk jaminan hutang”.

Menurut Agus Sartono (2015:121) *debt to equity ratio* adalah sebagai berikut:

“Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar risiko yang dihadapi, dan investor akan meminta tingkat keuntungan yang semakin tinggi.”

Menurut Hery (2015:195) *debt to equity ratio* sebagai berikut:

“Rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aset. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar aset perusahaan dibiayai oleh utang, atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pembiayaan aset.”

Dari definisi di atas dapat diketahui bahwa *debt to equity ratio* yaitu rasio yang digunakan untuk menilai hutang dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh hutang, termasuk hutang lancar dengan seluruh ekuitas.

2.1.4 Pertumbuhan Penjualan

2.1.4.1 Pengertian Pertumbuhan Penjualan

Menurut Kasmir (2016:107) pertumbuhan penjualan adalah sebagai berikut:

“Pertumbuhan penjualan menunjukkan sejauh mana perusahaan dapat meningkatkan penjualannya dibandingkan dengan total penjualan secara keseluruhan”.

Menurut Swastha dan Handoko (2011:98) pertumbuhan penjualan sebagai berikut:

“Merupakan indikator penting dari penerimaan pasar dari produk dan/atau jasa perusahaan tersebut, dimana pendapatan yang dihasilkan dari penjualan akan dapat digunakan untuk mengukur tingkat pertumbuhan penjualan.”

Menurut Sofyan (2013:309) pertumbuhan penjualan sebagai berikut:

“Rasio pertumbuhan menggambarkan persentase pertumbuhan pos-pos perusahaan dari tahun ke tahun. Rasio ini terdiri atas kenaikan penjualan, kenaikan laba bersih, *earning per share*, dan kenaikan *dividen per share*.”

Berdasarkan definisi di atas dapat diketahui bahwa pertumbuhan penjualan (*sales growth*) menggambarkan peningkatan penjualan dari tahun ke tahun dan menggambarkan tingkat profitabilitas perusahaan. Tingginya tingkat *sales growth* menunjukkan semakin baik suatu perusahaan dalam menjalankan operasinya. Pertumbuhan penjualan sering menggambarkan keberhasilan suatu perusahaan.

2.1.4.2 Metode Pengukuran Pertumbuhan Penjualan

Menurut Kasmir (2016:107) rasio pertumbuhan ini dapat menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Net sales growth ratio} = \frac{\text{Net sales } t - \text{net sales } t - 1}{\text{Net sales } t - 1} \times 100\%$$

Keterangan:

- Net Salest: Penjualan bersih perusahaan pada tahun t
- Net Salest-1: Penjualan bersih perusahaan pada tahun t-1

Pertumbuhan penjualan menunjukkan sejauh mana perusahaan dapat meningkatkan penjualannya dibandingkan dengan total penjualan secara keseluruhan. Pertumbuhan penjualan menggambarkan tingkat profitabilitas perusahaan dan semakin tinggi tingkat pertumbuhan penjualan perusahaan maka semakin baik kegiatan operasional perusahaan.

2.1.5 Tax Avoidance

2.1.5.1 Pengertian Pajak

Definisi pajak pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Menurut Sukrisno Agoes dan Estralita Trisnawati (2016:6) pajak sebagai berikut:

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksa) yang terutang oleh

yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

Menurut Rochmat Soemitro dalam Sukrisno Agoes dan Estralita Trisnawati(2016:6) pajak sebagai berikut:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal-balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Menurut MJH. Smeets dalam Sukrisno Agoes dan Estralita Trisnawati (2016:6) pajak sebagai berikut:

“Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan secara individual; maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.”

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa pajak merupakan kewajiban terhadap negara yang telah diatur oleh undang-undang harus dibayarkan oleh wajib pajak yang tinggal di negara tersebut, pajak digunakan untuk melaksanakan pembangunan nasional agar mencapai kemakmuran rakyat.

2.1.5.2 Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan nasional karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan nasional untuk mencapai kesejahteraan negara. Terdapat dua fungsi

pajak menurut Resmi (2014: 3) sebagai berikut:

1. “Fungsi *budgetair* (sumber keuangan Negara)
Artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti: PPh, PPn, PPnBM, PBB, dan lain-lain.
2. Fungsi *regulerend* (pengatur)
Artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.”

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi pajak sebagai sumber penerimaan bagi negara untuk membiayai pembangunan nasional dan pengeluaran rutin, selain itu juga sebagai alat pengatur dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi.

2.1.5.3 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2013:7) di Indonesia sendiri sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut:

1. “*Official Assesment System*
Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.
2. *Self assessment system*
Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.
3. *Withholding system*
Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.”

2.1.5.4 Jenis-jenis Pajak

Menurut Sukrisno Agoes (2013:7) Pajak dapat dibagi menjadi beberapa menurut golongannya, sifatnya, dan lembaga pemungutannya. Jenis-jenis pajak tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Menurut sifatnya, pajak dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu:
 - a. Pajak Langsung
Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan oleh pihak lain dan menjadi beban langsung Wajib Pajak (WP) yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan.
 - b. Pajak Tidak Langsung
Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
2. Menurut sasaran/objeknya, pajak dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu:
 - a. Pajak Subjektif
Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang dilanjutkan dengan mencari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan diri WP. Contoh: PPh
 - b. Pajak Objektif
Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objek tanpa memperhatikan keadaan diri WP. Contoh: PPn, PPnBM, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Materai (BM).
3. Menurut pemungutannya, pajak dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu:
 - a. Pajak Pusat
Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah pusat. Contohnya: PPh, PPn, PPnBM, PBB, dan BM.
 - b. Pajak Daerah
Pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah daerah. Contohnya: pajak reklame, pajak hiburan, pajak hotel dan restoran.

Berdasarkan pengertian di atas dapat diketahui bahwa jenis pajak dibagi menurut golongan dan sifatnya, pajak menurut golongan yaitu pajak yang ditanggung oleh pribadi atau dibebankan ke pihak ketiga. Sedangkan pajak menurut sifat yaitu pajak yang memperlihatkan keadaan subjek atau objeknya.

2.1.5.5 Beban Pajak

Merujuk dari PSAK Nomor 46 Paragraf 5 dan 6, beban pajak (penghasilan pajak) adalah jumlah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba-rugi pada suatu periode. Beban pajak (penghasilan pajak) terdiri dari beban pajak kini (penghasilan pajak kini) adalah jumlah pajak penghasilan terutang atas penghasilan kena pajak pada satu periode dan beban pajak tangguhan (penghasilan pajak tangguhan) adalah jumlah pajak penghasilan terutang untuk periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa beban pajak merupakan jumlah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan berdasarkan periodenya dalam satu periode atau periode mendatang.

2.1.5.6 Manajemen Pajak

Pajak merupakan salah satu penerimaan negara. Namun, bagi perusahaan pajak merupakan suatu beban yang harus ditanggung perusahaan. Beban pajak bagi perusahaan merupakan pengurang bagi laba. Sedangkan tujuan perusahaan yaitu untuk mendapatkan laba semaksimal mungkin. Oleh sebab itu, perusahaan mencari upaya untuk meminimalkan beban pajak, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pengusaha adalah dengan meminimalkan beban pajak dalam batas yang tidak melanggar aturan, karena pajak merupakan salah satu faktor pengurang laba. (Pohan 2013:3).

Menurut Pohan (2016:13) manajemen pajak sebagai berikut:

“Usaha menyeluruh yang dilakukan tax manager dalam suatu perusahaan atau organisasi agar hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan dari perusahaan atau organisasi tersebut dapat dikelola dengan baik, efisien dan ekonomis, sehingga memberi kontribusi maksimum bagi perusahaan.”

Menurut Bernad (2011:122) manajemen pajak sebagai berikut:

“Manajemen pajak merupakan kegiatan untuk mewujudkan nyata fungsi-fungsi manajemen sehingga efektivitas dan efisiensi pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan dapat tercapai. Manajemen pajak akan memiliki manfaat atau nilai guna yang besar bila perusahaan dapat melaksanakannya sesuai dengan tujuan awal yang telah ditetapkan. Strategi mengefisienkan beban pajak (penghematan pajak) yang dilakukan oleh perusahaan haruslah bersifat legal, agar dapat menghindari sanksi-sanksi pajak dikemudian hari. Secara umum penghematan pajak menganut prinsip the last and latest, yaitu membayar dalam jumlah seminimal mungkin dan pada waktu terakhir yang masih diizinkan oleh undang-undang dan peraturan perpajakan.”

Berdasarkan pengertian di atas dapat diketahui bahwa manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Manajemen pajak merupakan upaya dalam melakukan penghematan pajak secara legal.

2.1.5.7 Pengertian *Tax Avoidance*

Pengertian penghindaran pajak menurut Indrayagus Slamet (2015:8), adalah: “Penghindaran Pajak adalah diartikan sebagai suatu skema transaksi yang ditunjukkan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan ketentuan perpajakan suatu negara.”

Menurut Pohan (2013:13), penghindaran pajak yaitu:

“Penghindaran pajak adalah strategi dan teknik penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan.”

Menurut Pohan (2013:10), pengertian penghindaran pajak yaitu:

“*Tax avoidance* adalah upaya mengefisiensikan beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak dengan mengarahkannya pada transaksi yang bukan objek pajak.”

Menurut Dyreng (2010) dalam Budiman dan Setiyono (2015), penghindaran pajak adalah sebagai berikut:

“Penghindaran Pajak adalah usaha mengurangi, atau bahkan meniadakan utang pajak yang harus dibayar perusahaan dengan tidak melanggar Undang-Undang yang ada.”

Menurut Mardiasmo (2009) dalam jurnal penelitian Rinaldi (2015), *tax avoidance* adalah sebagai berikut :

“*Tax avoidance* adalah suatu usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang yang ada”.

Adapun pengertian lain menurut Suandy (2011:20), pengertian penghindaran pajak adalah sebagai berikut:

“Suatu usaha pengurangan secara legal yang dilakukan dengan cara memanfaatkan ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan secara optimal, seperti pengecualian dan pemotongan-pemotongan yang diperkenankan maupun manfaat hal-hal yang belum diatur dan kelemahan-kelemahan yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku.”

Menurut Iman Santoso dan Ning Rahayu (2013:5) *Tax Avoidance*

(penghindaran pajak) dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara yaitu:

1. Menahan diri

Wajib pajak tidak melakukan sesuatu yang bisa dikenai pajak, seperti tidak merokok agar terhindar dari cukai tembakau, atau tidak menggunakan ikat pinggang dari kulit ular atau buaya agar terhindar dari pajak/cukai atas pemakaian barang tersebut.

2. Pindah lokasi

Memindahkan lokasi usaha atau domisili yang tarif pajaknya tinggi ke lokasi yang tarif pajaknya rendah.

3. Penghindaran pajak secara yuridis

Perbuatan ini dilakukan dengan cara sedemikian rupa sehingga perbuatan-perbuatan yang dilakukan tidak terkena pajak. Biasanya dilakukan dengan memanfaatkan kekosongan atau ketidakjelasan undang-undang (*loopholes*).”

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa penghindaran pajak merupakan upaya penghindaran dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan dalam undang-undang dan peraturan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang namun tetap dalam bingkai ketentuan peraturan perpajakan.

2.1.5.8 Metode Pengukuran *Tax Avoidance*

Saat ini sudah banyak cara dalam pengukuran *tax avoidance*. Terdapat dua belas cara yang dapat digunakan dalam mengukur *tax avoidance* yang umumnya digunakan Sartika (2012) dalam Hanlon dan Heitzman (2010), dimana disajikan dalam Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Pengukuran *Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak)

No	Metode Pengukuran	Cara Perhitungan	Keterangan
1	<i>GAAP ETR</i>	$\frac{\text{Worldwide Total Income Tax Expense}}{\text{Worldwide Total Pre – Tax Accounting Income}}$	<i>Total tax expense per dollar of pretax book income</i>
2	<i>Current ETR</i>	$\frac{\text{Worldwide Current Income Tax Expense}}{\text{Worldwide Total Pre – Tax Accounting Income}}$	<i>Current tax expense per dollar of pretax book income</i>
3	<i>Cash ETR</i>	$\frac{\text{Worldwide Cash Income Tax Expense}}{\text{Worldwide Total Pre – Tax Accounting Income}}$	<i>Cash taxes paid per dollar of pre-tax book income</i>
4	<i>Long-run Cash ETR</i>	$\frac{\text{Worldwide Income Total Tax Expense}}{\text{Worldwide Total Pre – Tax Accounting Income}}$	<i>Sum of cash taxes paid over and years divided by the sum of pre-tax earnings over years</i>
5	<i>ETR Differential</i>	Statutory ETR – GAAP ETR	<i>The difference of between the statutory ETR and firm's GAAP ETR</i>
6	<i>DTAX</i>	Error Term from the Following Regression : ETR Differential x Pre-Tax Book Income = a + bx control + e	<i>The unexplained portion of the ETR differential</i>
7	<i>Total BTD</i>	Pre-tax book income – (U.S CTE – fgn CTE)/U.S.STR) – (NOLt – NOLt-1)	<i>The total difference between book and taxable income</i>
8	<i>Temporary BDT</i>	Deffered tax expense/U.S STR	<i>The total difference between book and taxable income</i>

9	<i>Abnormal total BTD</i>	Residual from $BTD/TA_{it} = \beta TA_{it} + \beta_{mi} + e_{it}$	<i>A measure of unexplained total book-tax difference</i>
10	<i>Unrecognized tax benefits</i>	Disclosed amount post-FIN48	<i>Tax liability accrued for taxes not yet paid on uncertain positions</i>
11	<i>Tax shelter activity</i>	Indicator Variable for firms accused of engaging in a tax shelter	<i>Firms identified via firm disclosure, the press, or IRS confidential data</i>
12	<i>Marginal tax rate</i>	Simulated marginal tax rate	<i>Present value of taxes on an additional dollar of income</i>

Sumber : Harlon dan Heitzman (2010)

Menurut Dyreng, et al (2010) variabel penghindaran pajak dihitung melalui CETR (*Cash Effective Rate*) pada perusahaan yaitu kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak.

Rumus untuk menghitung CETR menurut Dyreng, et al (2010) adalah sebagai berikut:

$$CETR = \frac{\text{Cash Tax Paid}}{\text{Net Income Before Tax}}$$

Semakin besar *Cash ETR* ini mengindikasikan semakin rendah tingkat penghindaran pajak perusahaan. Pengukuran *tax avoidance* menggunakan *Cash ETR* menurut Dyreng, et. al (2008) dalam Simarmata (2014), baik digunakan untuk:

“Menggambarkan kegiatan penghindaran pajak oleh perusahaan karena *Cash ETR* tidak terpengaruh dengan adanya perubahan estimasi seperti penyisihan penilaian atau perlindungan pajak. Selain itu pengukuran

menggunakan *Cash ETR* dapat menjawab atas permasalahan dan keterbatasan atas pengukuran *tax avoidance* berdasarkan model GAAP ETR. Semakin kecil nilai *Cash ETR*, artinya semakin besar penghindaran pajaknya, begitupun sebaliknya.”

Dalam penelitian ini penulis menggunakan rumus CETR bertujuan untuk mengindikasi tingkat penghindaran pajak pada perusahaan. Alasan penelitian ini menggunakan rumus CETR ini menggambarkan penghindaran pajak perusahaan dengan pertimbangan bahwa semakin besar *Cash ETR* ini mengindikasikan semakin rendah tingkat penghindaran pajak perusahaan. Selain itu, CETR menggambarkan semua aktivitas *tax avoidance* yang mengurangi pembayaran pajak kepada otoritas perpajakan dan CETR tidak terpengaruh dengan adanya perubahan estimasi seperti penyisihan penilaian atau perlindungan pajak.

2.1.6 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Tahun	Judul	Hasil Penelitian
1	Kurniasih dan Sari	3013	Pengaruh <i>Return On Assets</i> , <i>Leverage</i> , <i>Corporate Governance</i> , Ukuran Perusahaan, dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa <i>ROA</i> , Ukuran Perusahaan, dan Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> , sedangkan <i>Leverage</i> dan <i>Corporate Governance</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> .

2	I Gusti Ayu Cahya Maharani dan Ketut Alit Suardana	2014	Pengaruh <i>Coporate Governance</i> , Profitabilitas dan Karakter Eksekutif Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa <i>Corporate Governance</i> dan Profitabilitas berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> , sedangkan Karakteristik Eksekutif tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
3	Wirna Yola Agusti	2014	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , dan <i>Corporate Governance</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa Profitabilitas dan <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> , sedangkan <i>Corporate Governance</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
4	Calvin Singly dan I Made Sukartha	2015	Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> , dan <i>Sales Growth</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa Karakter Eksekutif, Ukuran Perusahaan, dan <i>Leverage</i> berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> sedangkan Komite Audit dan <i>Sales Growth</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
5	Ida Ayu Rosa Dewinta dan Putu Ery Setiawan	2016	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, <i>Leverage</i> , dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa <i>Leverage</i> dan Pertumbuhan Penjualan berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> , sedangkan Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan,

				dan Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
6	Teguh Muji Waluyo Yessi Mutia Basri dan Rusli	2016	Pengaruh <i>Return On Asset</i> , <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal dan Kepemilikan Institusi Terhadap Penghindaran Pajak	Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa <i>Return On Assets</i> , <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan, berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> , sedangkan Kompensasi Rugi Fiskal dan Kepemilikan Institusi tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
7	Moses Dicky Refa Saputra	2017	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , dan <i>Corporate Governance</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Komite Audit, Komisaris Independen berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
8	Mayarisa Oktamawati	2017	Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> , Pertumbuhan Penjualan, dan Profitabilitas Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Hasil Penelitian tersebut menyatakan bahwa Karakter Eksekutif, <i>Leverage</i> , dan Profitabilitas berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> , sedangkan Komite Audit, Ukuran Perusahaan,

				dan Pertumbuhan Penjualan tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
9	Rusli Reinaldo	2017	Pengaruh <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan, <i>Return On Assets</i> , Kepemilikan Institusional, Kompensasi Kerugian Fiskal, dan <i>Corporate Social Responsibility</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Hasil Penelitian tersebut menyatakan bahwa ROA, Kompensasi Kerugian Fiskal, dan <i>Corporate Social Responsibility</i> berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> , sedangkan <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan, dan Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
10	Wastam Wahyu Hidayat	2018	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , dan Pertumbuhan Pejualan Terhadap Penghindaran Pajak	Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa Profitabilitas dan <i>Growth Sales</i> berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> , sedangkan <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> .

Sumber Data diolah penulis

2.2 Kerangka Pemikiran

Pajak merupakan sumber penerimaan utama sekaligus menjadi yang paling penting dalam menopang pembiayaan pembangunan yang bersumber dari

dalam negeri. Sesuai dengan UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak merupakan “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Berdasarkan isi undang-undang tersebut, terlihat jelas bahwa pajak merupakan sumber pendapatan bagi negara. Sedangkan, bagi perusahaan pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih suatu perusahaan. Perbedaan kepentingan negara yang menginginkan penerimaan pajak yang besar dan berkelanjutan bertolak belakang dengan kepentingan perusahaan yang menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin.

Perbedaan kepentingan bagi negara dan bagi perusahaan berdasarkan teori keagenan akan menimbulkan ketidakpatuhan yang dilakukan oleh wajib pajak atau pihak manajemen perusahaan yang akan berdampak pada upaya perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Kerangka pemikiran penelitian ini menunjukkan pengaruh variabel independen, yaitu profitabilitas, *leverage* dan pertumbuhan penjualan terhadap variabel dependen, yaitu *tax avoidance*. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

2.2.1 Pengaruh Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance*

Profitabilitas merupakan gambaran kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aktiva yang dikenal dengan *Return On Assets*.

Pada penelitian ini *ROA* digunakan sebagai indikator untuk mengukur profitabilitas perusahaan.

Menurut Dendiwijaya (2010:120) sebagai berikut:

“*Return on Assets* mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tinggi nilai *ROA* yang mampu diraih oleh perusahaan maka performa keuangan perusahaan dikategorikan baik dengan profitabilitas yang tinggi maka semakin tinggi kesempatan melakukan perencanaan pajak.”

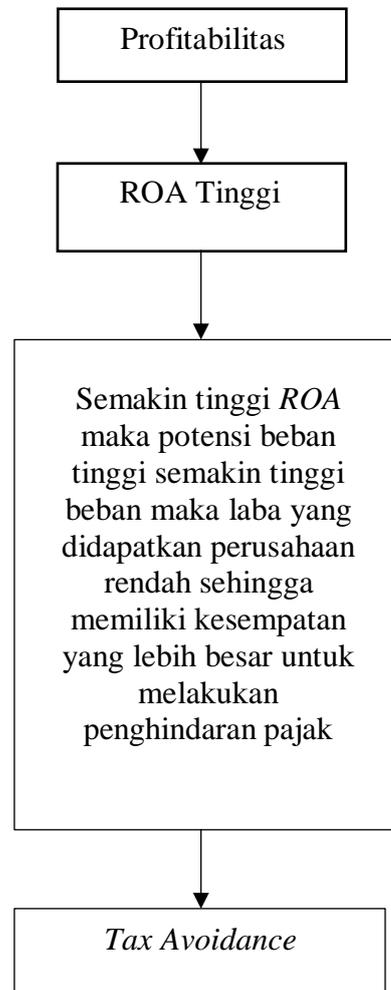
Menurut Pohan (2013:3) sebagai berikut:

“Salah satu upaya yang dilakukan oleh perusahaan adalah dengan meminimalkan beban pajak, karena pajak merupakan salah satu faktor pengurang laba. Besarnya beban pajak seperti kita ketahui tergantung pada besarnya penghasilan. Semakin besar penghasilan semakin besar pula pajak yang terutang. Oleh karena itu perusahaan membutuhkan perencanaan pajak agar perusahaan membayar pajak dengan efisien.”

Adapun hubungan profitabilitas terhadap *tax avoidance* yang dinyatakan oleh Ida Ayu Rosa Dewinta dan Putu Ery Setiawan (2016) sebagai berikut:

“Perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas tinggi maka semakin tinggi pula tingkat *tax avoidance* suatu perusahaan yang disebabkan karena perusahaan dengan laba yang besar akan lebih leluasa untuk memanfaatkan celah (*loopholes*) terhadap pengelolaan beban pajaknya.”

Berikut merupakan gambar kerangka pemikiran dari pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* :



Gambar 2.1
Skema Pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*

2.2.2 Pengaruh *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance*

Leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana perusahaan dibiayai dengan utang. Dalam kaitannya dengan pajak, apabila perusahaan memiliki kewajiban yang tinggi maka perusahaan akan memiliki utang yang tinggi pula dan munculnya biaya bunga, biaya bunga yang besar akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak (Surya, 2016).

Pernyataan tersebut didukung pula oleh Kasmir (2014:112) menyatakan bahwa:

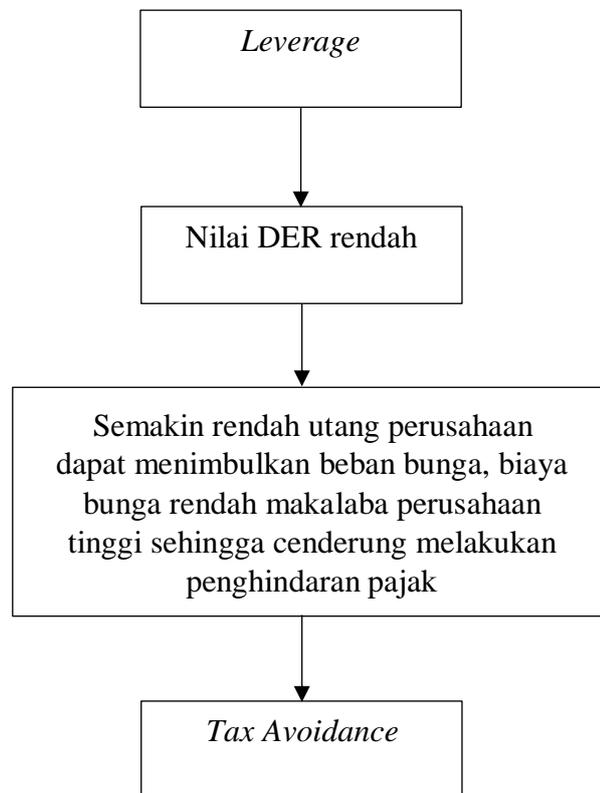
“*Leverage* menunjukan sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. *Leverage* menunjukan penggunaan utang untuk membiayai investasi. *Leverage* menunjukan pembiayaan suatu perusahaan dari utang yang mencerminkan semakin besar nilai perusahaan. Semakin tingginya jumlah pendanaan dari pihak ketiga yang digunakan perusahaan maka semakin besar pula biaya bunga yang timbul dari utang tersebut. Biaya bunga yang semakin tinggi akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan. Semakin tinggi nilai utang perusahaan maka *tax avoidance* pada perusahaan akan semakin rendah.”

Adapun hubungan *leverage* dengan *tax avoidance* yang dinyatakan oleh Nurfadilah (2014) sebagai berikut:

“Perusahaan yang memiliki nilai dari rasio *leverage* tinggi, berarti semakin tinggi jumlah pendanaan dari utang pihak ketiga yang digunakan perusahaan dan semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari utang tersebut. Biaya bunga yang semakin tinggi akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan”.

Dari pernyataan diatas semakin tinggi nilai dari *leverage*, berarti semakin tinggi jumlah pendanaan dari utang pihak ketiga yang digunakan perusahaan dan semakin tinggi pula beban bunga yang timbul dari utang tersebut. Akibatnya laba yang diperoleh perusahaan akan berkurang sehingga pajak yang harus dibayar perusahaan akan menjadi lebih rendah. Beban yang rendah akan berdampak pada penghindaran pajak. (Dharma dan Ardiana)

Berikut merupakan gambar kerangka pemikiran dari pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*:



Gambar 2.2
Skema Pengaruh *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance*

2.2.3 Pengaruh Pertumbuhan Penjualan Terhadap *Tax Avoidance*

Perusahaan dapat memprediksi seberapa besar profit yang akan diperoleh dengan besarnya pertumbuhan penjualan. Apabila pertumbuhan penjualan suatu perusahaan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, maka perusahaan tersebut memiliki prospek yang baik. Jika tingkat penjualan bertambah, maka penghindaran pajaknya meningkat. Hal tersebut terjadi karena jika penjualan meningkat, maka akan meningkatkan laba sehingga berdampak pada semakin tingginya biaya pajak yang harus dibayar. Oleh karena itu, perusahaan akan melakukan penghindaran pajak agar beban pajak perusahaan tidak tinggi (Mayasari Oktamawati, 2017).

Pernyataan tersebut didukung pula oleh Pohan (2016:23) menyatakan bahwa:

“Peningkatan pertumbuhan penjualan secara tidak langsung akan meningkatkan laba. Perusahaan dengan laba yang besar cenderung akan melakukan perencanaan pajak dengan semaksimal mungkin sehingga dapat mengurangi pembayaran pajak kepada pemerintah.”

Adapun hubungan pertumbuhan penjualan dengan *tax avoidance* yang dinyatakan oleh Dewinta dan Setiawan (2016) adalah sebagai berikut:

“Semakin besar penjualan maka semakin besar laba yang akan diperoleh perusahaan, sehingga laba yang dibebankan oleh perusahaan akan semakin besar dan semakin besar pula kesempatan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak.”

Selain itu, Ida Ayu Rosa Dewinta dan Putu Ery Setiawan (2016) menyatakan hubungan antara pertumbuhan penjualan dengan *tax avoidance* adalah sebagai berikut:

“Pertumbuhan penjualan yang meningkat memungkinkan perusahaan akan lebih dapat meningkatkan kapasitas operasi perusahaan, karena dengan pertumbuhan penjualan yang meningkat, perusahaan akan memperoleh profit yang besar, maka dari itu perusahaan akan cenderung untuk melakukan praktik *tax avoidance*, karena dengan profit yang besar akan menimbulkan beban pajakyang besar pula.”

Dari pernyataan diatas semakin besar volume penjualan suatu perusahaan menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan perusahaan tersebut semakin meningkat. Apabila pertumbuhan penjualan meningkat, laba yang dihasilkan perusahaan diasumsikan mengalami peningkatan. Laba perusahaan mengalami kenaikan berarti pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan akan semakin besar sehingga perusahaan akan cenderung akan melakukan penghindran pajak (Deitiana 2011).

Berikut merupakan gambar kerangka pemikiran dari pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance*:



Gambar 2.3
Skema Pengaruh Pertumbuhan Penjualan terhadap *Tax Avoidance*

2.3 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2017:64) menyatakan bahwa yang dimaksud hipotesis sebagai berikut:

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.

Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban empiric.”

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hipotesis yang telah diuraikan sebelumnya, diantaranya:

H1: Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

H2: *Leverage* berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

H3: Pertumbuhan Penjualan berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*.